



# PARLEMEN REMAJA **2024**

**GENERASI CERDAS**



**Pendidikan Berkualitas,  
Mewujudkan Indonesia Emas**



**TOR Seminar Nasional**



**TERM OF REFERENCE (TOR)**

**SEMINAR NASIONAL PARLEMEN REMAJA 2024**

**BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

---

## PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK PEMUDA

Konsekuensi dari perkembangan demokrasi adalah adanya pergeseran dinamika kehidupan politik nasional. Pergeseran ini turut membawa perubahan terhadap dinamika sistem lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Perubahan-perubahan inilah yang menandakan tingkat keberhasilan pembangunan politik yang demokratis di Indonesia.

Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pembangunan politik tanah air, yaitu perkembangan situasi dalam negeri dan konstelasi politik internasional. Di antara keduanya, faktor yang paling dominan adalah bagaimana perkembangan partisipasi politik yang berlangsung dalam masyarakat. Partisipasi politik merupakan elemen esensial pada negara demokrasi, sebab indikator kualitas demokrasi suatu negara banyak ditentukan oleh tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Wujud penyelenggaraan partisipasi politik masyarakat dapat melalui berbagai macam cara, seperti ikut serta dalam pemilihan umum, atau menyampaikan aspirasi dalam pembuatan kebijakan. Namun, pangkal dari wujud partisipasi politik masyarakat adalah pendidikan politik.

Pendidikan politik merupakan proses yang mempengaruhi individu sehingga individu tersebut memperoleh informasi, wawasan, dan keterampilan politik, sehingga dapat berpartisipasi dengan baik sesuai paham kedaulatan rakyat. Pada akhirnya, bekal ini akan membuat dirinya sanggup bersikap kritis dan lebih terarah dalam tindakan politiknya. Pada politik modern, kegiatan partisipasi politik menjadi semakin vital untuk dipelajari, khususnya pada masyarakat muda dalam mengawasi dan mengawal kegiatan perpolitikan di tanah air. Hal ini termasuk dalam mendorong partisipasi pemuda dalam pemilihan umum. Pada dasarnya, pendidikan dan partisipasi politik pemuda dapat turut berkembang sesuai keadaan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Melalui pendidikan politik yang tepat, para pemuda akan memiliki pengetahuan tentang dinamika politik yang berkembang secara lebih matang.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Lembaga Negara yang memiliki kuasa legislatif, berkomitmen penuh menjadi bagian dari pembangunan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan politik, sekaligus menjalankan mandat dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU) atau organisasi internasional untuk parlemen di dunia. Mandat ini tertuang dalam resolusi *Youth Participation in The Democratic Process* yang diadopsi dari *The 122<sup>nd</sup> IPU Assembly*, yang mengamanahkan negara-negara parlemen di dunia untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi muda.

## TENTANG PARLEMEN REMAJA

Kanal pendidikan politik yang secara rutin diselenggarakan oleh DPR RI adalah kegiatan *Parlemen Remaja* dengan menargetkan pelajar setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) / sederajat sebagai peserta. Rentang usia pelajar dipilih dengan mempertimbangkan keterlibatan remaja sebagai kelompok pembelajar yang bersiap memilih pemimpin negara untuk pertama kalinya dalam pesta demokrasi.

Parlemen Remaja adalah kegiatan yang bersifat partisipatoris dengan mendorong dan mengedepankan partisipasi aktif pesertanya. Oleh karena itu, proses edukasi politik tidak hanya dilaksanakan dengan menerapkan metode satu arah melalui penyampaian materi oleh narasumber, melainkan juga membuka ruang diskusi bagi peserta untuk berdialog dan bertanya jawab langsung dengan para narasumber. Tidak terbatas pada penyampaian materi, para peserta akan dilibatkan secara langsung dalam aktivitas bermain peran (*role play*) melalui kegiatan Simulasi Persidangan. Peserta akan dilatih dan dipandu untuk kemudian diberi kesempatan menjadi wakil rakyat selama seminggu, agar dapat merasakan secara langsung suasana kebatinan dalam menjalankan tugas keparlemenan, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Rangkaian kegiatan Parlemen Remaja terdiri dari :

### 1. Orientasi

Orientasi bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada peserta untuk dapat dipergunakan pada kegiatan Simulasi Persidangan. Meliputi seminar-seminar dengan menghadirkan narasumber ahli di bidangnya, yaitu *Seminar Pembekalan*, *Seminar Mekanisme Kerja DPR RI*, dan *Rapat Dengar Pendapat Umum*.

### 2. Kunjungan Kerja

Sebagaimana layaknya Anggota DPR RI yang sesungguhnya, peserta Parlemen Remaja akan melakukan Kunjungan Kerja ke lokasi-lokasi yang berkaitan dengan tema pembahasan Rancangan Undang-Undang. Hal ini bertujuan agar peserta dapat menampung data dan informasi yang menjadi bahan dalam proses pengambilan keputusan pada saat Simulasi Persidangan.

### 3. Simulasi Persidangan

Peserta Parlemen Remaja akan menjalankan peran sebagai Anggota DPR RI dalam membahas suatu Rancangan Undang-Undang yang menjadi tema kegiatan melalui Simulasi Persidangan, di antaranya yaitu Simulasi Rapat Kerja dan Simulasi Rapat Paripurna.

## TEMA KEGIATAN

Setiap tahunnya, perhelatan Parlemen Remaja mengusung tema yang berbeda-beda sesuai dengan jalannya pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berlangsung di DPR RI. Pada tahun 2024, kegiatan Parlemen Remaja mengusung tema :

### **GENERASI CERDAS :**

### **PENDIDIKAN BERKUALITAS, MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS**

Tema tersebut didasarkan pada Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang menjadi muatan materi dalam Simulasi Persidangan Parlemen Remaja 2024. Pemilihan RUU Sisdiknas pada tema Parlemen Remaja didasarkan atas unsur kedekatan substansi dengan generasi muda pelajar dan memperhatikan isu pro-kontra yang berkembang di masyarakat terkait penerapan UU Sisdiknas yang ada saat ini.

Selain UU Sisdiknas, ada 2 (dua) undang-undang lain yang pada dasarnya merupakan turunan dari UU Sisdiknas, yaitu UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga undang-undang ini saling bersinergi sebagai wujud dukungan regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun dalam perkembangannya terdapat kebutuhan hukum masyarakat, khususnya terhadap substansi dari UU Sisdiknas yang perlu diubah, baik karena adanya substansi sulit diimplementasikan, belum diatur (adanya kekosongan hukum / *rechtsvacuum*), adanya pembatalan akibat putusan mahkamah konstitusi, maupun perlunya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Hal ini penting karena UU Sisdiknas pada hakekatnya adalah undang-undang yang bersifat umum (*lex general*) yang akan memayungi undang-undang lain yang terkait dengan pendidikan, termasuk diantaranya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Masuknya RUU Sisdiknas sebagai RUU yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024, memunculkan kembali desakan masyarakat terhadap reformulasi pendidikan masa depan agar dapat mengatasi dampak *learning loss* atau kemunduran dalam proses belajar mengajar. Diperlukan pembaharuan terhadap Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia yang relevan sesuai dengan kondisi situasi saat ini. Sejalan dengan proses penyusunannya, terdapat pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik, dan pelajar, terkait norma-norma yang perlu dilakukan perubahan.

Pada gelaran Parlemen Remaja 2024, peserta akan menyampaikan pandangan pro dan kontra yang berkaitan dengan independensi perguruan tinggi dan diversifikasi kurikulum pendidikan. Kondisi dan pengaturan saat ini, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki tingkat otonomi yang berbeda-beda, ada yang berbentuk Badan Hukum, Badan Layanan Umum, dan Satuan Kerja. Dalam konteks ini, pemerintah mengusulkan PTN Badan Hukum untuk mengakselerasi transformasi tanpa mengurangi dukungan pembiayaan dari pemerintah dan afirmasi terhadap calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Namun, praktik di lapangan hal ini berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang melambung dan memberatkan calon mahasiswa, karena ketika PTN berbentuk Badan Hukum maka tanggung jawab dari pemerintah berkurang.

Kondisi lainnya terkait Sistem Pendidikan Nasional adalah pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia tanpa melihat variasi kondisi dan kebutuhan daerah, serta pendidikan pesantren yang berjalan terpisah dari sistem pendidikan nasional pada umumnya. Usulan perbaikan dari pemerintah tahapan pemenuhan SNP diberlakukan secara bervariasi sesuai dengan kondisi tiap daerah agar pemerintah daerah termotivasi melakukan perbaikan yang bermakna, serta SNP berlaku pada keseluruhan jalur pendidikan formal termasuk pesantren. Pandangan kontra masyarakat terhadap konteks ini adalah isu sentralisasi pendidikan agama karena dianggap akan mengerdilkan pemahaman peserta didik terhadap agama.

## **TUJUAN PELAKSANAAN SEMINAR NASIONAL**

Seminar Nasional merupakan rangkaian dari pelaksanaan kegiatan Parlemen Remaja yang bertujuan untuk :

1. Membuka ruang diskusi antara peserta dengan narasumber pakar di bidang pendidikan untuk memperoleh pengetahuan tentang proses pembentukan RUU Sisdiknas di DPR RI
2. Peserta mendapat pengetahuan terkait pandangan pemerintah dalam upaya perbaikan Sistem Pendidikan Nasional
3. Memberi pemahaman peserta terkait aspek *meaningful participation* (partisipasi bermakna) dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang sesuai asas keadilan yang dibutuhkan masyarakat, yaitu *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*
4. Sebagai referensi peserta untuk mengambil sikap dan argumen pada saat perdebatan dalam Simulasi Persidangan

## TARGET PESERTA

Peserta adalah siswa/siswi aktif tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA)/ sederajat, yang telah lolos proses seleksi Parlemen Remaja. Adapun seleksi terdiri dari penilaian CV, penulisan esai peserta, dan pembuatan video kampanye peserta. Seleksi peserta dilakukan di seluruh daerah pemilihan (dapil) di Indonesia yang berjumlah 80 dapil.

## PELAKSANAAN

Seminar Nasional Parlemen Remaja akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 10 September 2024

Waktu : 13.00 s.d 15.00 WIB

Tempat : Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI  
Jalan Raya Puncak Km 79, Cisarua, Bogor

Moderator : *Public Figure (dalam konfirmasi)*

Narasumber :

1. Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol, *Wakil Ketua Komisi X DPR RI*
2. Ir. Suharti, M.A., Ph.D., *Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI*
3. Darmaningtyas, *Pakar dan Aktivis Pendidikan Nasional*

## TOPIK PEMBAHASAN NARASUMBER

Masing-masing narasumber akan menyampaikan pemaparan terkait poin-poin berikut :

### **Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol., *Wakil Ketua Komisi X DPR RI***

1. Menyampaikan evaluasi terhadap UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terkait implementasi kebijakan dan berbagai permasalahan yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia, terkhusus tiga topik utama yang dibahas dalam simulasi Parlemen Remaja 2024.
2. Menyampaikan peran DPR RI dalam fungsi pengawasan dan anggaran terhadap kebijakan sistem pendidikan di Indonesia.

### **Ir. Suharti, M.A., Ph.D., *Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI***

1. Menyampaikan implementasi kebijakan dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI, serta berbagai permasalahan yang terjadi di dalam sistem pendidikan nasional, terkhusus tiga topik utama yang dibahas dalam simulasi Parlemen Remaja 2024.

2. Menyampaikan pandangan terkait evaluasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dari sudut pandang pemerintah.

#### **Darmaningtyas, Pakar dan Aktivis Pendidikan Nasional**

1. Menyampaikan pandangan terkait implementasi kebijakan dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai permasalahan yang terjadi di dalam sistem pendidikan nasional, terkhusus tiga topik utama yang dibahas dalam simulasi Parlemen Remaja 2024, dari sudut pandang masyarakat yang *concern* mengawasi sistem pendidikan nasional.
2. Menyampaikan pandangan terkait evaluasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dari sudut pandang masyarakat yang *concern* mengawasi sistem pendidikan nasional.
3. Menyampaikan masukan dari unsur masyarakat terhadap permasalahan sistem pendidikan nasional, khususnya tiga topik utama yang dibahas dalam simulasi Parlemen Remaja 2024.

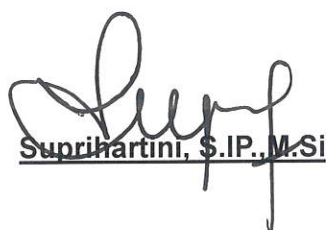
#### **PENUTUP**

Demikian *Term of Reference* ini disusun sebagai panduan narasumber untuk menyampaikan pemaparan demi mendukung terlaksananya kegiatan Parlemen Remaja 2024 dengan lancar. Terima kasih.

Jakarta, 9 Juli 2024

**Deputi Bidang Persidangan**

**Setjen DPR RI**



Suprihartini, S.IP., M.Si